



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFIKAR HADIDH
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 252599

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 970.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 404 m²/275 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 404 m²/275 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
3. Tanah Seluas 676 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 276.900.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000
2. MOBIL, GRAND LIVINA 1.5 XV MANUAL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV TIPE 2.0 G/MANUAL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 85.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 35.150.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.367.050.000

III. HUTANG

Rp. 477.572.025

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 889.477.975



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.